

MOTIF PERILAKU KOREA UTARA MENINGKARI DEKLARASI PANMUNJOM DITINJAU DARI *REGIONAL SECURITY COMPLEX THEORY*

Dewi Astuti Mudji, Tino Rila Sebayang, Fathira Iftihani N

Universitas Pasundan, Bandung

Email: tinobayang@unpas.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to find out the reasons for North Korea's behavioral motives for rejecting the Panmunjom Declaration. The Korean peninsula returned to a tense situation after North Korea violated several value agreements that threatened South Korea and regional security stability by continuing to test its nuclear weapons and blow up its liaison office in retaliation for South Korea's failure to prevent anti-North deployments. Korean propaganda from defector groups at the border. By using descriptive analytical research method with a qualitative approach, this paper uses primary and secondary data obtained from books, journals, articles, and official government and non-government documents. In addition, this paper uses the Regional Security Complex Theory, the concept of the National Interest, the theory of rationality in policy making. The results of this paper indicate that the motive for North Korea's behavior is to maintain the security of its country from threats from the United States and other countries and so that its country is considered a nuclear country whose position is equal to other countries and demands the lifting of the sanctions embargo. Moreover, the current state of tension is being used by North Korea to increase its influence in the dialogue.

Keywords: Korea, Panmunjom Declaration, Nuclear, Regional Security Complex, Rationality, Decision-making Process

PENDAHULUAN

Konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara menjadi perhatian serius dalam fenomena hubungan internasional, khususnya pada aspek keamanan. Ketegangan politik dan keamanan kedua negara ini, juga memberikan dampak yang signifikan di kawasan Asia Timur. Faktor yang mempengaruhi situasi ketegangan antar kedua negara, berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir yang secara konsisten dilakukan oleh Korea Utara, tepatnya sejak tahun 1953. Tindakan Korea Utara tersebut, sering mendapat kecaman dari negara-negara lainnya, khususnya dari Korea Selatan – yang secara langsung dapat merasakan eksistensi ancaman atas pengembangan senjata nuklir yang dilakukan.

Aspek keamanan negara (*national security*), merupakan kepentingan yang vital bagi setiap aktor internasional, di tengah situasi tatanan politik internasional yang *anarchy*. Terlebih, situasi dan konstelasi keamanan regional merupakan determinasi paling krusial dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dan tindakan suatu negara (Paramasatya & Pradipta, 2019). Fokus tulisan ini adalah, membahas mengenai perilaku Korea Utara pasca Deklarasi Panmunjom disepakati, khususnya pada tahun 2019-2020 – terkait upaya pemulihan hubungan antar kedua negara melalui *Inter-Korean Summit* di Panmunjom yang disepakati pada tahun 2018 silam. Pertemuan ini menghasilkan sebuah perjanjian, yang disebut sebagai Deklarasi Panmunjom. Terdapat tiga poin utama yang disepakati oleh kedua negara dalam agenda Deklarasi tersebut, yaitu; 1) Gencatan senjata yang ditujukan sebagai upaya perdamaian permanen, 2) Penghentian proyek pembangunan nuklir Korea Utara (denuklirisasi), serta 3) Komitmen untuk melakukan *reunifikasi* antar keduanya (Ministry of Foreign Affairs, 2018).

Namun, saat ini merupakan masa sulit untuk mengimplementasikan nilai-nilai kesepakatan yang terkandung dalam Deklarasi Panmunjom. Beberapa nilai dalam deklarasi yang melibatkan hubungan antar-Korea termasuk proyek bersama, kerjasama, pertukaran, kunjungan tampaknya telah berhasil dilakukan pada 2018 silam, namun beberapa nilai lainnya penulis melihat masih belum dapat dilaksanakan. Permasalahan di Korea masih tetap menjadi ancaman bagi perdamaian di kawasan. Dikarenakan puncak ketegangan antar-Korea terjadi pada tahun 2020.

Upaya denuklirisasi tidak lagi terlihat mengalami kemajuan, kondisi Semenanjung Korea belum dapat dikatakan stabil. Korea Utara tidak akan menyerah dalam urusan program nuklirnya, hal ini diperlihatkan oleh Korea Utara sepanjang tahun 2019 secara konsisten meluncurkan uji coba nuklirnya (Korean Peninsula, A to Z, n.d.). Perkembangan teknologi yang semakin canggih mendorong perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir. Korea Utara dianggap telah mengingkari suatu nilai yang sudah disepakati dalam Deklarasi Panmunjom. Secara khusus penulis melihat salah satu permasalahan yang terjadi saat disebabkan oleh perilaku Korea Utara yang tidak kooperatif dalam memenuhi beberapa nilai kesepakatan dalam Deklarasi Panmunjom. Maka dari itu tulisan ini akan menggambarkan motif perilaku Korea Utara yang dianggap menyimpang dari Deklarasi Panmunjom dengan menggunakan Regional Security Complex Theory.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk menjelaskan interaksi social dan menemukan proses sebuah peristiwa yang sedang diamati dan memberikan pemahaman terkait fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menelusuri data-data yang berasal dari buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi pemerintahan dan non-pemerintahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

KERANGKA KONSEPTUAL

Berkaitan dengan pembahasan, dalam penelitian ini ditulis dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory*. Menurut Buzan, *Regional Security Complex* didefinisikan oleh pola persahabatan (*Amity*) yang mengatur hubungan keamanan yang baik dan permusuhan (*Enmity*) di mana adanya rasa saling curiga yang terbentuk actor dalam kawasan. Buzan dan Waever juga mendefinisikan *Regional Security Complex* sebagai pola ketergantungan keamanan berdasarkan kedekatan letak geografis yang cenderung lebih banyak melakukan interaksi keamanan dengan actor di dalam wilayah daripada berinteraksi dengan actor yang berada di luar wilayah yang berbeda. Hal ini disebabkan kedekatan wilayah cenderung lebih berpotensi mendapatkan ancaman keamanan (Buzan & Waever, 2003: 45).

Sikap Korea Utara terhadap masalah nuklir yang cenderung agresif membuat aspek keamanan kawasan menjadi semakin kompleks. Buzan dan Waever juga menyebutkan anarkisme kawasan merupakan salah satu aspek pembentuk kompleksitas keamanan kawasan. (Buzan & Waever, 2003; 46).

Selain itu untuk menggambarkan mengenai perilaku Korea Utara yang menyimpang dari nilai-nilai Deklarasi, penulis juga menggunakan konsep Kepentingan Nasional. Konsep Kepentingan Nasional dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional disebutkan bahwa kepentingan nasional menurut para penganut realis sebagai upaya negara dalam mengejar *power* yang dapat mengembangkan dan memelihara control suatu negara terhadap negara lain (Perwita & Yani, 2017: 35).

Tulisan ini juga menyajikan teori *Rationality* untuk membahas mengenai *cost and benefit* dalam pengambilan suatu kebijakan negara. Dalam teori *rationality*, membuat suatu kebijakan luar negeri dilihat berdasarkan tujuan apa yang akan dicapai, melakukan evaluasi

seberapa penting prioritas negara dalam membuat sebuah keputusan, meninjau dari aspek *cost and benefit* dari setiap tindakan yang dilakukan dan kemudian memilih salah satu *benefit* tinggi dengan *cost* rendah. Untuk menjelaskan mengenai perilaku Korea Utara dalam mengingkari perjanjian, tulisan ini menggunakan konsep *Rationality of State*, dalam beberapa catatan para sarjana, beberapa teori realis membuat asumsi yang kuat tentang rasionalitas negara, namun asumsi tersebut tidak esensial bagi realisme. Waltz dan Morgenthau menolak asumsi bahwa negara bertindak secara rasional (Lobell et al., 2009).

PEMBAHASAN

Pada tahun 2018 menjadi momentum bersejarah antar-Korea setelah mengadakan pertemuan yang menghasilkan sebuah Deklarasi Panmunjom pada 27 April 2018. Pertemuan tersebut ditunjukkan bahwa adanya perubahan terhadap hubungan antar-Korea yang sebelumnya mengalami ketegangan. Dalam deklarasi tersebut memiliki nilai-nilai utama yang menjadi tujuan besar dalam upaya perdamaian, berkomitmen untuk mengakhiri perang menjadi perdamaian permanen. Dalam deklarasi ini mengandung nilai-nilai utama yaitu 1) Gencatan senjata yang ditujukan sebagai upaya perdamaian permanen, 2) Penghentian proyek pembangunan nuklir Korea Utara (denuklirisasi), serta 3) Komitmen untuk melakukan *reunifikasi* antar keduanya (Ministry of Foreign Affairs, 2018). Agenda pertemuan trilateral atau quadrilateral untuk upaya denuklirisasi juga dilakukan dengan melibatkan actor-aktor internasional seperti Amerika Serikat dan Cina. Mengutip dari laman Reuters berdasarkan pada isi deklarasi tersebut, kedua negara sepakat untuk mewujudkan Semenanjung Korea yang damai dan bebas nuklir dengan melalui upaya "*complete denuclearization*" (Reuters, 2018).

Deklarasi ini menjadi peran penting dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan, karena dapat membuka peluang untuk tercapainya resolusi konflik. Dalam aspek keamanan, perdamaian dan peningkatan hubungan antar-Korea menjadi keinginan rakyat Korea maupun masyarakat internasional untuk mencapai pada keamanan bersama. Masyarakat menunggu adanya langkah lebih jauh untuk mencapai Semenanjung Korea yang lebih damai.

Deklarasi Panmunjom memberikan potensi yang cukup baik bagi perkembangan hubungan antar Korea khususnya keamanan kawasan Asia Timur. Namun pada tahun 2019 hubungan kedua Korea yang telah dibangun mengalami kemunduran dan kembali pada situasi yang bertegangan. Dalam tulisan ini pembahasan mengenai perilaku Korea Utara yang mengingkari Deklarasi Panmunjom akan terbagi menjadi dua yaitu upaya pertahanan Korea

Utara dari ancaman Amerika Serikat dan kemarahan Korea Utara akibat permasalahan internal antara Korea Utara dan Korea Selatan itu sendiri.

a. Perilaku Korea Utara yang mengingkari kesepakatan denuklirisasi

Sesuatu hal yang tidak diinginkan dapat terjadi kapan saja, perubahan situasi antar-Korea mulai terjadi pada tahun 2019. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa tujuan adanya Deklarasi Panmunjom salah satunya adalah untuk upaya denuklirisasi, namun di sisi lain pasca hubungan antar Korea membaik, Korea Utara menunjukkan sikap provokatifnya terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat yaitu dengan uji coba peluncuran misil balistik maupun rudal. Provokasi dan ancaman Korea Utara telah menciptakan kompleksitas keamanan Semenanjung Korea menjadi tidak stabil. Pengembangan senjata yang dilakukan Korea Utara meningkatkan kemungkinan perlawanan oleh negara-negara regional.

Berdasarkan pada nilai-nilai yang tercantum dalam deklarasi bahwa kedua Korea memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan penyelesaian denuklirisasi Semenanjung Korea yang bebas nuklir. Hal ini sebagai langkah yang diprakarsai oleh Korea Utara yang sifatnya sangat krusial bagi denuklirisasi dan sepakat untuk memenuhi tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks denuklirisasi Korea Utara sempat menunjukkan komitmennya dengan menutup fasilitas uji coba nuklir yang terletak di Punggyeri (VOA Indonesia, 2018). Di samping itu nampaknya Korea Utara tidak benar-benar serius dengan komitmennya. Dilaporkan melalui laman KBS World bahwa pada 4 Mei 2019 Korea Utara meluncurkan beberapa proyektil pendek yang diluncurkan dari Semenanjung Hodo ("Korean Peninsula, A to Z," n.d.). Tindakan tersebut dianggap memprovokasi Korea Selatan dan Amerika Serikat. Korea Utara telah lama bersikap provokatif yang mengancam stabilitas keamanan dengan perkembangan senjatanya. Walaupun sudah mendapat berbagai kecaman dan sanksi internasional dari negara-negara lain, nampaknya Korea Utara tidak peduli dan bersikap acuh. Jika melihat dari sisi Korea Selatan sebagai negara yang merasakan eksistensinya secara langsung, masih menanggapi hal tersebut dengan bijak, meskipun tindakan tersebut mengganggu namun Korea Selatan masih bertahan demi menjaga hubungan baik.

Dari perilaku Korea Utara yang masih meluncurkan uji coba rudalnya menunjukkan bahwa Korea Utara telah melanggar komitmennya yang telah disepakati pada Deklarasi Panmunjom 2018 lalu. Pola interaksi di antara Korea Utara dan Korea Selatan saat ini berada dalam kondisi dilemma keamanan. Perilaku Korea Utara yang agresif merupakan sinyal diplomatiknya terhadap Amerika Serikat. Dengan berbagai aktifitas pengembangan rudal dan

nuklirnya membuat Korea Utara mendapat sanksi dari Amerika Serikat maupun PBB. Merujuk pada konsep kepentingan nasional, Morgenthau mengatakan bahwa keinginan terhadap kekuasaan yang dianggap sebagai pendorong di balik perilaku suatu negara yaitu keadaan internal atau karakteristik endogen negara. Suatu pemimpin negara yang memiliki keinginan untuk memiliki kekuasaan, Morgenthau menyebutnya dengan “nafsu tak terbatas terhadap kekuasaan” selalu mencari peluang untuk mendominasi saingan (Burchill, 2005: 35-36).

Penulis melihat aktivitas Korea Utara tersebut dilatarbelakangi oleh upaya untuk menjaga keamanan negaranya, selain itu dengan kekuatan militer yang dimilikinya menjadi tujuan Korea Utara untuk menyetarakan posisinya dengan negara-negara lain dan dianggap sebagai negara nuklir untuk menghadapi AS.

Korea Utara menerapkan *Military First* sebagai politik luar negerinya, sehingga akan terasa sulit untuk benar-benar melakukan denuklirisasi. Korea Utara memiliki ideologi “Juche” artinya kemandirian yang diperkenalkan pertama kali oleh Kim Il Sung. Namun kemandirian ini memiliki arti yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh Kim Il Sung yaitu: singkatnya, menjadi penguasa revolusi dan rekonstruksi di negara sendiri dengan berpegang teguh pada kemerdekaan, menolak ketergantungan pada orang lain, menggunakan otaknya sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, semangat revolusioner dan memecahkan masalah atas tanggung jawab sendiri di bawah keadaan apapun (Lee, 1997).

Kompleksitas keamanan antar-Korea di Asia Timur sangat menarik, terlebih dengan adanya intervensi Amerika Serikat yang membuat dilemma keamanan Korea Utara karna kepemilikan senjatanya. Perubahan sikap Korea Utara dipengaruhi oleh Amerika Serikat. *Regional Security Complex Theory* mendefinisikan bahwa, negara menjadi pemain utama di papan permainan dan sebagai pemain internasional dan memberikan pengaruh secara global (Buzan & Waever, 2003: 14). Kim Jong Un pada awalnya sangat terbuka dan sepakat untuk melakukan denuklirisasi melalui dialog dengan Amerika Serikat pada 2018 yang dilakukan di Singapura dalam upaya denuklirisasi, namun dialog antara keduanya berakhir tanpa kesepakatan pada Februari 2019.

Merujuk pada hal tersebut, Buzan dan Waever dalam bukunya menyebutkan bahwa negara adidaya memiliki kepentingan yang luas dan kemampuan yang dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga negara di dalam wilayah akan melindungi dirinya dari ancaman yang datang dari luar (Buzan & Waever, 2003: 46). Dalam konteks ini terjadi gesekan kepentingan di mana Amerika Serikat akan meringankan sanksi yang diberikannya jika Korea

Utara bersedia untuk melucuti senjatanya (Tempo,2019). Hal ini tentu akan sulit bagi Korut dalam memenuhinya, dikarenakan nuklir merupakan senjata bagi pertahanan negaranya. Artinya, dapat terlihat bahwa adanya intervensi Amerika Serikat sebagai *global power* terhadap aspek keamanan Korea Utara menjadi salah satu motif Korea Utara mengingkari perjanjian Panmunjom.

Perjanjian yang sudah disepakati nampaknya masih belum mampu meredakan ketegangan, peningkatan senjata Korea Utara akan membuat kekhawatiran Korea Selatan bahkan negara kawasan lainnya. Jepang menganggap senjata yang dimiliki Korea Utara sebagai ancaman besar karena letak antara Jepang dengan Korea Utara sangat berdekatan. Cina sebagai negara yang memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara yang selama ini menjadi aliansinya turut mengecam aksi yang dilakukan Korea Utara. Cina mengambil sikap tegas untuk mendukung resolusi sanksi terhadap Korea Utara setelah uji coba nuklir Korea Utara (Qiu, 2021: 160). Hal ini dapat dianggap bahwa Cina tidak akan membiarkan Korea Utara runtuh, jika hal itu terjadi dikhawatirkan akan memperkuat hegemoni AS di Asia Timur.

Hampir sepanjang tahun sejak Mei-November 2019 Korea Utara secara konsisten melakukan uji coba senjatanya. Perilaku suatu negara mempengaruhi terbentuknya kepentingan nasional suatu negara. Tindakan tersebut tentunya mendapatkan respon dari Korea Selatan dan Amerika yang merasa bahwa tindakan tersebut merupakan provokasi. Korea Utara menuntut akan kebebasan sanksi terhadap negaranya. Perkembangan isu nuklir Korut merupakan konsekuensi dari keterbatasan hubungan bilateral antara AS-Korut-Korsel. Penyelesaian masalah nuklir di masa depan bergantung pada kerangka multilateral yang di dorong oleh hubungan bilateral (Qiu, 2021).

Sejauh ini penulis melihat sikap provokatif Korut yang terus berusaha mengembangkan senjatanya merupakan upaya dalam menjaga keamanan negaranya dari ancaman AS. Hal ini memang menyimpang dari nilai-nilai kesepakatan dalam Deklarasi Panmunjom, selain upaya denuklirisasi kedua Korea juga sepakat untuk meredakan ketegangan militer dan menghilangkan bahaya perang untuk menghentikan permusuhan. Berdasarkan pada kesepakatan dalam masalah nuklir dalam Deklarasi Panmunjom dengan melibatkan pihak lain rasanya belum dapat terpenuhi karena sikap Korea Utara yang sudah tidak memiliki ketertarikan untuk melakukan dialog (CNN Indonesia, 2019).

b. Tindakan balasan Korea Utara dalam menghadapi propaganda dari kelompok pembelot

Berangkat dari nilai kesepakatan mengenai upaya menghentikan permusuhan, Deklarasi Panmunjom disepakati sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan, namun keadaan menjadi memburuk ketika Korea Utara meledakkan kantor penghubung yang didirikan 2018 lalu sebagai fasilitas untuk mempermudah jalur komunikasi antar Korea. Hal ini membuat perdamaian yang telah disepakati dalam Deklarasi Panmunjom mengalami kemunduran. Seperti yang dilaporkan kembali oleh BBC News bahwa pada 16 Juni 2020 Korea Utara meledakkan kantor penghubung antar Korea di Gaesong, Korea Utara (BBC News, 2020).

Tindakan Korut tersebut disebabkan karena adanya penyebaran selebaran anti Korut yang dilakukan oleh kelompok pembelot Korea Utara mengenai hal-hal yang berisi tentang propaganda dan kritik terhadap masalah Hak Asasi Manusia di Korea Utara. Aksi propaganda tersebut membuat kemarahan Korea Utara memuncak karena Korea Selatan dinilai tidak dapat mencegah tindakan propaganda tersebut. Seperti yang diketahui bahwa aksi pembelotan sudah sering terjadi, sehingga Korea Utara memutuskan untuk menerapkan permusuhan kembali.

Berdasarkan *individual decision maker* bahwa, suatu kebijakan dibuat oleh individu yaitu Presiden atau Menteri. Namun, apakah individu tersebut dapat membuat keputusan rasional untuk kepentingan negara itu. Di sisi lain terkadang emosional dapat menghalangi dalam membuat sebuah keputusan.

Terdapat 3 jenis *Individual Decision Maker*, yaitu;

1. Individu akan membuat keputusan yang kurang baik untuk melihat keputusan tertentu itu adalah karena kesalah pahaman
2. Pengambilan keputusan individu akan menderita bias afektif karena mereka merasakan emosi karena marah atau bingung mana yang tidak akan menjadi kepentingan terbaik negara atau individu memiliki respon emosional yang melekat
3. Kognitif Bias, membuat kebijakan tidak dapat membuat keputusan rasional, karena mereka bahkan tidak memahami semua opsi. Pemimpin bahkan terbatas dalam keputusan yang mereka ambil karena tidak tahu semua pilihan.

Berdasarkan sikap Kim Jong Un dalam meledakkan kantor penghubung untuk menanggapi tindakan propaganda oleh pembelot, maka pengambilan keputusan tersebut termasuk pada

jenis nomor 2. Karena pengambilan keputusan tersebut dipandang dari rasionalitas, tetapi dari tindakan tersebut sikap Korea Utara menjadi tidak rasional.

Merujuk pada penjelasan tersebut, di sisi lain Korea Selatan tidak dapat mencegah propaganda tersebut, namun Korea Utara melakukan tindakan yang justru membuat keadaan semakin keruh. Kondisi ini membuat anarkisme kawasan sehingga proses dialog antar negara menjadi minim dan sulit untuk dicapai. Kompleksitas permasalahan menjadi tantangan dalam menciptakan keamanan kawasan, adanya perbedaan kepentingan antar-Korea lebih besar dari pada perdamaian yang diinginkan. Korea Utara dan Korea Selatan belum memiliki kerangka kebijakan keamanan bersama untuk mengatasi ketegangan antar negara kawasan. Terlebih sejak awal 2020 adanya serangan pandemic covid-19 yang menyerang hampir seluruh negara di dunia. Korea Utara saat ini menjadi negara yang mengisolasi diri dari kehidupan luar sehingga sulit untuk melakukan pertemuan dengan Korea Selatan membahas perkembangan Deklarasi Panmunjom.

Masalah utama di Korea Utara-Amerika Serikat, pertemuan tingkat tinggi akan menjadi peta jalan menuju pelaksanaan denuklirisasi, yang terdiri dari subjek, kategori, waktu dan pengurutan (Sung, 2018: 4). Seluruh pihak yang berkepentingan dalam keamanan di Semenanjung Korea pada prinsipnya kebutuhan rezim perdamaian untuk menghentikan konflik secara permanen. Permasalahan yang terjadi di Asia Timur semakin rumit, pengembangan nuklir dan pola permusuhan yang dibuat Korea Utara membuat kompleksitas keamanan kawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas mengenai motif perilaku Korea Utara, pada tahun 2019 Korea Utara secara konsisten terus mengembangkan nuklirnya. Factor ancaman berupa sanksi embargo dari Amerika menjadi salah satu motif Korea Utara yang dianggap mengingkari Deklarasi Panmunjom yang merupakan perjanjian untuk denuklirisasi. Selain itu Korea Utara ingin negaranya dianggap sebagai negara nuklir yang memiliki posisi yang sama dengan negara-negara lainnya. Ideology "Jusche" juga menjadi factor pendorong sulitnya Korea Utara untuk benar-benar komitmen dalam denuklirisasi. Di sisi lain keberadaan senjata nuklir Korea Utara merupakan suatu ancaman besar terhadap keamanan antar negara kawasan sehingga menyebabkan keamanan menjadi semakin kompleks. Deklarasi Panmunjom merupakan sebuah pencapaian yang mengubah krisis menjadi perdamaian, namun upaya tersebut tidak sepenuhnya meredam tindakan Korea Utara yang ambisius terhadap senjata nuklirnya.

Perbedaan kepentingan antara Amerika dan Korea Utara dalam konteks denuklirisasi membuat keadaan menjadi tidak stabil. Sebenarnya motif Korea Utara adalah keinginan untuk pencabutan sanksi ekonomi yang diberikan Amerika. Peran negara Cina sebagai mitra Korea Utara sangat berpengaruh terhadap pertahanan ekonomi Korea Utara. Jika Amerika tidak mencabut sanksi, maka Korea Utara akan semakin jatuh. Di satu sisi Korea Utara tidak ingin mengurangi senjata nuklirnya karena untuk pertahanan apabila nantinya harus melawan negara lain.

Serangan penyebaran propaganda dari kelompok pembelot ke perbatasan memperkeruh keadaan setelah Korea Utara merespon dengan meledakkan kantor penghubung yang telah didirikan sebagai fasilitas komunikasi bersama pada tahun 2018. Tindakan tersebut melanggar nilai kesepakatan Deklarasi Panmunjom dalam mengurangi ketegangan militer dan menghilangkan hal-hal yang berbau propaganda. Kekecewaan Korea Utara yang tidak dapat mencegah para pembelot menjadi salah satu motif perilaku Korea Utara untuk membalas perbuatan tersebut ke Korea Selatan.

Jika melihat ke belakang mengenai Deklarasi Panmunjom itu sendiri, negara-negara yang terlibat perlu melakukan peninjauan kembali terkait kejelasan dari deklarasi itu sendiri. Upaya perdamaian dan denuklirisasi melalui Deklarasi Panmunjom seharusnya membuat negara menjadi rasional, tetapi Korea Utara menjadi tidak rasional. Perilaku Korea Utara menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai kawasan bebas nuklir. Sikap Korea Utara yang tidak dapat diprediksi dikhawatirkan akan menyebabkan perang terbuka karena Korea Utara masih terus mengembangkan senjatanya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Burchill, Scott. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*. *The National Interest in International Relations Theory*. <https://doi.org/10.1057/9780230005778>.
- Buzan, B. & Waeber, O 2003, *Regions and Powers: The Structure of International Security*, New York: Cambridge University Press
- Lee, Grace. 1997. "The Political Philosophy of Juche." *Stanford Journal of East Asian Affairs* 3 (1): 105–12.

- Paramasatya, Satwika, and Yemima Galih Pradipta. 2019. "The Dynamics of the Constellation in East Asia: Japan's Response towards Changes of the Regional Status-Quo Post-Panmunjom Declaration." *AEGIS: Journal of International Relations* 3 (2): 204–26.
- Qiu, Fahua. 2021. "Rethinking Avenues to Resolve North Korean Nuclear Issues: Bilateral Relations or Multilateral Coordination?" *Open Journal of Political Science* 11 (01): 155–68.
- Lobell, Steven E., Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro. 2009. *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*. Cambridge University Press 2009.
- Sung, Ki-Young. 2018. "Evaluation of 2018 Inter-Korean Summit and Future Prospects." *Korea Institute for National Unification*, 1–5.
- Waeber, Barry Buzan & Ole. 2003. *Regions and Powers: The Structures of International Security*. New York: Cambridge University Press.
- Yani, Dr. Anak Agung Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad. 2017. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT Remaja Rosdakarya.

Internet

- CNN Indonesia, 2019. "Korea Utara Mengaku Sudah Tak Tertarik Berunding Dengan AS" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191119110316-113-449594/korea-utara-mengaku-sudah-tak-tertarik-berunding-dengan-as>
- <https://fokus.tempo.co/read/1287405/diplomasi-tiga-negara-dukung-dialog-amerika-dan-korea-utara>
- https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1&titleNm=
- Korea Utara Bongkar Apa yang Disebut Lokasi Uji Coba Nuklir. (2018). VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/korea-utara-bongkar-apayang-disebut-lokasi-uji-coba-nuklir/4407884.htm>
- "Korean Peninsula, A to Z." n.d. *KBS World Radio*. South Korea. Accessed March 15, 2021. <http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/index.htm?lang=i>.
- News, BBC. 2020. "Korea Utara: Korut 'ledakkan Kantor Penghubung' Dekat Perbatasan Korsel." <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53059907>.
- Reuters. 2018. "Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula," 2018. <https://www.reuters.com/article/uk-northkorea-southkorea-summit-statement-idUKKBN1HY193>.